

STRUKTUR ORGANISASI BBPBL LAMPUNG





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kkp
2026
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RUANG LINGKUP, TUGAS DAN FUNGSI

BBPBL LAMPUNG

Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, mempunyai :

TUGAS

Melaksanakan Uji Terap Teknis dan Kerjasama, Pengelolaan Produksi, Pengujian Laboratorium, Mutu Pakan, Residu, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Sistem Informasi di Bidang Perikanan Budidaya Laut.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang perikanan budidaya laut;
2. Pelaksanaan Uji Terap Teknis perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis perikanan laut;
6. Pengelolaan dan layanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



INFORMASI KEPEGAWAIAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

DATA PEGAWAI

BBPBL LAMPUNG TH 2026



Rekapitulasi Pegawai BBPBL Lampung

PNS	: 69 orang
PPPK	: 24 orang
PPPK PW	: 19 orang
Outsourcing	: 21 orang

Jenis Kelamin

L	P
52	17
21	3
18	1
17	4

TOTAL PEGAWAI 131 ORANG

Pejabat
Struktural

2

Orang

Pejabat
Fungsional

70

Orang

Pelaksana

22

Orang

PENDIDIKAN



SD

8

SMP

1

SMA

50

DIII

18

DIV / S1

39

S2

15

PERIODE TAHUN 2026, TIM KODE ETIK **TIDAK PERNAH MENEMUKAN PELANGGARAN** TERKAIT KEPEGAWAIAN BAIK PELANGGARAN DALAM KATEGORI RINGAN, SEDANG MAUPUN BERAT DI LINGKUNGAN BBPBL LAMPUNG

BBPBL LAMPUNG



panganbiru

bbpbllampung

BBPBL LAMPUNG

@bbpbl_lampung

BBPBL LAMPUNG



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN (Audited) TA 2025
BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, Desember 2025
Kepala BBPBL Lampung,



Mulyanto, ST,M.Si
NIP197406122005021002

DAFTAR ISI
TAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan (audited) TA 2025 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan (audited) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pesawaran, Desember 2025



Mulyanto, ST,M.Si
NIP197406122005021002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) TA 2025 Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp919.552.243 ,- atau mencapai 73,64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.248.703.000,-

Realisasi Belanja Negara pada akhir periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.601.619.346,- atau mencapai 95,55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp29.933.025.000,- .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp41.823.584.501,- ; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp617.700.278,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp40.851.068.064,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp354.816.159,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp152.532.910,- dan Rp41.671.051.591,- Jadi jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp41.823.584.501,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari Operasi, surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp868.273.761,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp34.009.836.716,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (33.141.562.955,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp999.354.952,- dan surplus sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(32.142.208.003,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp46.174.926.474,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp32.142.208.003,-) dengan koreksi-koreksi senilai (Rp43.733.983,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.682.067.103,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp41.671.051.591,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 04
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG 427706

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,248,703,000	919,552,243	(329,150,757)	73.64	1,189,308,000	1,320,350,650	131,042,650	111.02
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,248,703,000	919,552,243	(329,150,757)	73.64	1,189,308,000	1,320,350,650	131,042,650	111.02
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,248,703,000	919,552,243	(329,150,757)	73.64	1,189,308,000	1,320,350,650	131,042,650	111.02
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	29,933,025,000	28,601,619,346	(1,331,405,654)	95.55	33,489,411,000	33,413,962,746	(75,448,254)	99.77
1. Belanja Pegawai	13,193,809,000	12,908,619,060	(285,189,940)	97.84	12,825,430,000	12,825,114,444	(315,556)	100
2. Belanja Barang	16,174,248,000	15,693,000,286	(481,247,714)	97.02	19,556,239,000	19,481,663,826	(74,575,174)	99.62
3. Belanja Modal	564,968,000	0	(564,968,000)	0.00	1,107,742,000	1,107,184,476	(557,524)	99.95
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 04
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG 427706

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29,933,025,000	28,601,619,346	(1,331,405,654)	95.55	33,489,411,000	33,413,962,746	(75,448,254)	99.77
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

BANDAR LAMPUNG, 5 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KEPALA BALAI

 M. J. SANTO, ST., M.SI
 NIP 197406122005021002

**BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	699.200	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.6	695.703	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PNB	C.7	(3.497)	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	617.004.575	1.778.346.192
Jumlah Aset Lancar		617.700.278	1.778.346.192
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11.050.462.500	11.050.462.500
Peralatan dan Mesin	C.15	70.261.568.977	70.261.568.977
Gedung dan Bangunan	C.16	32.329.501.867	32.329.501.867
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	3.554.698.928	3.554.698.928
Aset Tetap Lainnya	C.18	107.366.000	107.366.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(76.452.530.208)	(73.288.501.169)
Jumlah Aset Tetap		40.851.068.064	44.015.097.103
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	2.239.978.729	3.577.563.729
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.855.609.275)	(2.962.265.981)
Jumlah Aset Lainnya		354.816.159	615.297.748
JUMLAH ASET		41.823.584.501	46.408.741.043
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	152.532.910	233.814.569
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		152.532.910	233.814.569
JUMLAH KEWAJIBAN		152.532.910	233.814.569
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	41.671.051.591	46.174.926.474
JUMLAH EKUITAS		41.671.051.591	46.174.926.474
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		41.823.584.501	46.408.741.043

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	868.273.761	1.258.218.534
JUMLAH PENDAPATAN		868.273.761	1.258.218.534
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.856.359.860	12.856.850.444
Beban Persediaan	D.3	2.403.911.300	4.118.995.517
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.890.379.393	6.442.943.945
Beban Pemeliharaan	D.5	925.162.813	2.338.982.582
Beban Perjalanan Dinas	D.6	389.915.327	1.526.892.421
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	9.163.327.881	8.665.100.798
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.380.776.645	4.018.297.842
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		34.009.836.716	39.968.063.549
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(33.141.562.955)	(38.709.845.015)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(6.227.067.300)	(5.645.425.699)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		49.920.000	25.103.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		6.276.987.300	5.670.528.699
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Keg Non Operasional Lainnya		-	-
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL		-	-
Penerimaan kembali belanja barang TAYL		-	-
Pendapatan perolehan aset lainnya		-	-
Pendapatan penyelesaian Nilai persediaan		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7.226.422.252	827.382.944
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(32.142.208.003)	(36.081.287.770)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(32.142.208.003)	(36.081.287.770)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	46.174.926.474	49.405.625.350
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-32.142.903.706	(36.081.287.770)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(43.733.983)	(765.385.798)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
Transfer Masuk	E.3.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.7	(43.733.983)	(765.385.798)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.8	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27.682.067.103	32.085.203.096
EKUITAS AKHIR	E.5	41.670.355.888	46.174.926.474

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

*Dasar
Entitas
Rencana Strategis* *Hukum
dan*

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 **Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL)** adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pengembangan budidaya laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.

2. Fungsi

- Identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik budidaya laut,
- Pengujian standar perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,
- Pengujian alat, mesin dan teknik perbenihan serta pembudidayaan ikan laut,
- Pelaksanaan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,

- Pelaksanaan sertifikasi mutu dan sertifikasi personil perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,
- Pelaksanaan produksi dan pengelolaan induk penjenis dan induk dasar ikan laut
- Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan laut serta pengendalian hama dan penyakit ikan laut,
- Pengembangan teknik dan pengujian standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk dan benih ikan laut,
- Pengelolaan system jaringan laboratorium penguji dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan laut,
- Pengembangan dan pengelolaan system informasi dan publikasi pembudidayaan ikan laut
- Pengelolaan keanekaragaman hayati,
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditugaskan BBPBL telah menetapkan visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan **Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung** sebagai sebagai Penghasil Induk dan Benih Unggul, serta Teknologi Budidaya Laut Adaptif Terbesar di Indonesia.

Misi

1. Memproduksi Induk dan Benih Unggul Ikan Laut
2. Melaksanakan Penerapan Teknologi Budidaya Laut
3. Memproduksi Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan
4. Melaksanakan Pelayanan Laboratorium Uji
5. Melakukan Diseminasi Induk dan Benih Ikan Laut Unggul serta Teknologi Budidaya Laut.

Tujuan

Pengembangan teknologi budidaya adaptif

- Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perairan budidaya
- Mendukung pengembangan kawasan budidaya laut di daerah binaan
- Penyediaan benih dan calon induk ikan laut unggul
- Penyediaan pakan hidup dalam rangka mendukung pengembangan budidaya laut
- Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan, visualisasi dan sertifikasi

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

***Kebijakan
Akuntansi***

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Bogor. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Bogor adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

***Penyusutan
Tetap***

Aset c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai

yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan diadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan

penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang,	10 tahun

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- ◆ Pada tahun anggaran 2025 ini jumlah pegawai Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 132 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 68 orang, 24 Orang PPPK Penuh Waktu, dan tenaga Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebanyak 40 orang .

Nilai Pagu anggaran awal Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung pada Tahun Anggaran 2025 yaitu terdiri dari :

- ◆ - Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp30.611.457.000,-
- ◆ - Anggaran PNP sebesar Rp976.459.000,-
- ◆ Selama periode berjalan sampai dengan Triwulan III TA 2025, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 3(tiga) kali yaitu :
 - Revisi I yaitu pada tanggal 23 Februari 2025 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang masih sama dengan pagu anggaran awal ;
 - Revisi II (kedua) yaitu tanggal 27 Maret 2025 yaitu revisi POK dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya ;
 - Revisi DIPA ke III (ketiga) yaitu revisi kanwil tanggal 23 April 2025 dengan anggaran yang masih sama dengan anggaran revisi sebelumnya.
 - Revisi ke IV yaitu revisi kanwil tanggal 15 Juli 2025 dengan anggaran yang masih sama dengan anggaran revisi sebelumnya.
 - Revisi ke V yaitu tanggal 07 Oktober 2025 dengan anggaran yang masih sama dengan anggaran revisi sebelumnya.
 - Revisi ke VI yaitu revisi Kanwil tanggal 19 November 2025 dengan pagu anggaran yang mengalami perubahan menjadi Rp29.933.025.000,- dengan rincian :
 1. Anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp28.956.566.000,-
 2. Anggaran PNP/PNBP sebesar Rp 976.459.000,-
 - Revisi ke VII yaitu tanggal 19 Desember 2025 dengan pagu anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya.

Rincian anggaran pada periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pend Penjualan Hasil Perikanan	1.248.703.000	1.248.703.000
Jumlah Pendapatan	1.248.703.000	1.248.703.000
Belanja		
Belanja Pegawai	13.513.809.000	13.193.809.000
Belanja Barang	17.398.139.000	16.174.248.000
Belanja Modal	675.968.000	564.968.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	31.587.916.000	29.933.025.000

Realisasi

Pendapatan

Rp919.552.243,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp919.552.243,- atau mencapai 73,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.248.703.000,-. Pendapatan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung terdiri dari sbb:

- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (MAP 425112)
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (MAP 425131)
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi (MAP 425151)
- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (MAP 425289)
- Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin (425122)
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TYL (425911)

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut:

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pend Penj Hsl Perternakan & Budidaya	980.303.000	683.738.350	69,75
Pend. Penjualan peralatan dan mesin		49.920.000	
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	130.940.000	121.990.411	93,17
Pend Pengujian, Sertifikasi & Stand	137.460.000	62.545.000	45,50
Penerimaan Kemb B Pegawai TAYL	-	1.358.482	-
Jumlah	1.248.703.000	919.552.243	73,64

Realisasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Perikanan periode 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan sebesar 73,64 persen dibandingkan periode yang sama TA 2024.

1. Pendapatan penjualan hasil peternakan, perikanan mengalami penurunan sebesar 28,48 persen dibandingkan TA 2024 dikarenakan jumlah penjualan ikan yang mengalami penurunan akibat efek efesiensi.
2. Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar -6,51 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya perubahan akun pendapatan sewa rumah dinas dari akun 425131 ke akun 425151
3. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana Tusi mengalami peningkatan sebesar 60,30 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya perubahan akun sewa rumah dinas ke akun penggunaan sarana Tusi (425151) dan banyak anak PKL yang menggunakan fasilitas asrama.
4. Pendapatan pengujian sertifikasi dan stadarisasi mengalami penurunan sebesar -65,38 % , hal ini dikarenakan adanya penurunan jumlah sampel pengujian Laboratorium yang masuk sampai dengan akhir semester tahun ini.
5. Terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp49.920.000,- yaitu berupa penjualan 1 unit mesin pembuat pellet, satu

Laporan Keuangan Tahunan (audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2025
unit stationery generating set, 1 unit speed boat , 1 unit centrifuge (alat laboratorium umum) dan satu unit Preasure Sterilize.

6. Pada periode 31 Desember 2025 terdapat penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp1.358.482,- Penerimaan tersebut berasal dari pengembalian tukin atas pegawai yang melakukan tugas belajar yang mengalami penurunan kelas jabatan Tukin tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pend Penj Hasil Peternakan , pertanian	683.738.350	956.068.600	-28,48
Pend Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	-	45.400.934	-100,00
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	121.990.411	76.100.000	60,30
Pend Pengujian, Sertifikasi & Standarisasi	62.545.000	180.649.000	-65,38
Pend. penjualan peralatan dan mesin	49.920.000	-	#DIV/0!
Pendapatan pemindahtanganan BMN	-	25.103.000	-100,00
Pend.denda keterlambatan		-	
Penerimaan Kemb B Pegawai TAYL	1.358.482	19.913.971	-93,18
Penerimaan Kemb B Barang TAYL		17.115.145	
Penerimaan Kemb B Modal TAYL	-		0,00
Jumlah	919.552.243	1.320.350.650	69,645

Realisasi Belanja
Negara
Rp28.601.619.346,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Satker BBPBL Lampung per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.601.619.346,- atau 95,55 % dari anggaran belanja sebesar Rp29.933.025.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	13.193.809.000	12.908.619.060	97,84
Belanja Barang	16.174.248.000	15.693.000.286	97,02
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	564.968.000	0	0
Total Belanja Kotor	29.933.025.000	28.602.373.683	95,55

Laporan Keuangan Tahunan (audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2025

Pengembalian Belanja	0	754.337	
JUMLAH	29.933.025.000	28.601.619.346	95,55

Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan sebesar 14,60 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA. 2024. Hal ini dikarenakan pagu anggaran pada tahun ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu dan pada tahun ini Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung juga terkena dampak dari efisiensi anggaran sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang terealisasi.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.908.619.060	12.825.430.000	0,65
Belanja Barang	15.693.000.286	19.556.239.000	(19,75)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal	-	1.107.742.000	(100,00)
Jumlah	28.601.619.346	33.489.411.000	(14,60)

*Belanja Pegawai
Rp12.908.619.060,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.908.619.060,- dan Rp12.825.114.444,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai pada akhir periode Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar , persen dari TA 2024 hal ini disebabkan adanya penambahan 2 Calon Pegawai Negeri Sipil dan adanya penambahan PPPK sebanyak 13 orang yang berasal dari PPNPN pada periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.908.619.397	12.825.114.534	0,65
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	12.908.619.397	12.825.114.534	0,65
Pengembalian Belanja Pegawai	337	90	-
Jumlah Belanja	12.908.619.060	12.825.114.444	0,65

Belanja Barang
Rp15.693.000.286,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan periode per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.693.000.286,- dan Rp19.481.663.826,-. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 19,45 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024, hal itu disebabkan adanya dampak dari efisiensi anggaran dan pembatasan pengeluaran belanja barang yang diberlakukan pada tahun 2025 ini sehingga mengakibatkan pembelian belanja barang mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	942.045.250	2.034.319.035	(53,69)
Belanja Barang Non Operasional	658.072.663	1.762.255.910	(62,66)
Belanja Barang Persediaan	1.589.094.113	3.626.426.449	(56,18)
Belanja Jasa	3.319.983.139	2.652.978.069	25,14
Belanja Pemeliharaan	925.162.813	2.378.062.942	(61,10)
Belanja Perjalanan Dinas	390.669.327	1.529.072.421	(74,45)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	7.868.726.981	5.183.050.000	-
Bel Barang Lainnya untuk diserahkan kpd Masy.	-	349.000.000	-
Jumlah Belanja Kotor	15.693.754.286	19.515.164.826	(19,58)
Pengembalian Belanja	754.000	33.501.000	
Jumlah Belanja	15.693.000.286	19.481.663.826	(19,45)

Belanja Modal
Rp0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir periode Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp638.322.836,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak ada realisasi Belanja Modal sampai dengan periode akhir 31 Desember 2025 karena anggaran belanja modal mengalami pemblokiran pagu anggaran yang disebabkan oleh adanya dampak dari efisiensi anggaran yang berlaku pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Laporan Keuangan Tahunan (audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2025

URAIAN	TA 2025	TA 2025	NAIK(TURUN) %
Belanja Modal Pengurukan dan pematanganTanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.107.184.476	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja penambahan nilai Jalan dan Jembatan	0	0	
Belanja Modal perencanaan gedung dan bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	1.107.184.476	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	1.107.184.476	-100,00

Belanja Modal
Tanah
Rp0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- dan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	TW 2025	TW 2024
Belanja Modal Tanah	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp0,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Laporan Keuangan Tahunan (audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2025

Tidak ada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada akhir periode per 31 Desember 2025 karena adanya pemblokiran anggaran belanja modal akibat dampak dari efisiensi anggaran tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	0	617.922.836	0,00
			0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	617.922.836	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	617.922.836	0,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada akhir Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,- .Tidak ada realisasi Belanja Modal dan penambahan Gedung dan Bangunan pada Triwulan III TA 2025 dikarenakan karena pemblokiran anggaran belanja modal pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada akhir periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp0,- Tidak

Laporan Keuangan Tahunan (audited) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2025

ada realisasi Belanja Modal Jalan , Irigasi, dan Jaringan pada akhir periode semester II TA 2025 ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	THN 2025	THN 2024	Naik (Turun) %
Bel Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Lainnya
Rp,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang tunai di brankas	-	-
Uang di rekening bank	-	-
Jumlah Kas	-	-
Saldo akhir BP Kas	-	-
Jumlah Kas	-	-
Selisih Kas	-	-
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP	-	-
Jumlah UP	-	-
Saldo UP menurut UAKPA	-	-
Selisih pembukuan UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Piutang Bukan Pajak
Rp,-*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar TPA
Rp 0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp 3.497

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.497,- dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-		#VALUE!
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-		#VALUE!
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-		#VALUE!
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		#VALUE!

Belanja Dibayar di Muka
Rp 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan yang berakhir pada akhir periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp617.004.575,- dan Rp1.778.346.192,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Persediaan	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	86.884.790	866.685.426
Hewan & Tanaman dijual/diserahkan kpd masy	378.596.250	622.672.150
Brg Persed Lainnya u/ dijual/disrhkan kpd masy/Pemda	2.025.000	31.356.000
Bahan Baku	51.065.248	67.182.472
Persediaan Lainnya	98.433.287	190.450.144
Jumlah	617.004.575	1.778.346.192

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Penjelasan terkait rincian barang persediaan per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Barang konsumsi senilai Rp86.884.790- berupa alat kantor lainnya dan pakan ikan.
2. Hewan dan tanaman dijual / diserahkan kepada masyarakat senilai Rp378.596.250,- berupa ikan / benih ikan yang dijual ke masyarakat .
3. Barang persediaan lainnya untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat senilai Rp2.025.000,- berupa pakan buatan mandiri.
4. Bahan baku senilai Rp51.065.248,- berupa bahan baku pakan dan obat-obatan.
5. Persediaan Lainnya senilai Rp98.433.287,- berupa obat-obatan laboratorium Perikanan.

Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

TPA
Rp 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Tagihan PA			
Lancar	-	-	#VALUE!
Kurang Lancar	-	-	#VALUE!
Diragukan	-	-	#VALUE!
Macet	-	-	#VALUE!
Jumlah	-	-	#VALUE!
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		#VALUE!

Tanah

Rp11.050.462.500,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.050.462.500,- dan Rp11.050.462.500. Tidak ada mutasi tambah nilai tanah pada periode akhir semester II Tahun 2025

Rincian mutasi tanah dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	11.050.462.500
Mutasi tambah:	
	0
	0
Mutasi kurang:	
KDP	0
Saldo per 31 Desember 2025	11.050.462.500

Nilai asset tanah tersebut berasal dari pengurukan dan pematangan tanah tambak untuk kegiatan Budidaya udang system Cluster atau dikenal dengan nama Milenail Shrimp Farm (MSF) yang berlokasi di Kawasan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan mobilisasi dan kegiatan keselamatan kerja , untuk kegiatan pekerjaan tanah dan Geosintetik yang merupakan kegiaiatan divisi pekerjaan tanah (timbunan dan galian tanah). Berdasarkan survei lapangan maka untuk perhitungan luasnya tanah galian yaitu pekerjaan tambah timbunan biasa dari sumber galian , timbunan biasa dari dari sumber galian volume awal 14,256,00 M3 sehingga volume total menjadi 15,736,00M3.

Rincian saldo Tanah per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

1	4.732 m2	Way Muli, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung	751,505,000
2	59.000 m2	Jl. Yos Sudarso Hanura, Pesawaran, Lampung	8,947,144,000
3	96 m2	Jl. RE Marta Dinata Hanura, Pesawaran, Lampung	29,717,000
4	15.736.00M3	Jl. Yos Sudarso Hanura, Pesawaran, Lampung	91,082,000
Jumlah			9,819,448,000

Peralatan dan Mesin
Rp70.261.568.977,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada akhir periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,- dan Rp70.261.568.977,-. Tidak ada penambahan atau Mutasi tambah dari peralatan dan mesin pada akhir periode 31 Desember 2025 ini disebabkan oleh adanya pemblokiran pada anggaran belanja modal.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	70.261.568.977
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Trasfer Masuk	0
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	70.261.568.977
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	64.160.214.185
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6.101.354.792

Gedung dan Bangunan
Rp.32.329.501.867 ,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang berakhir pada periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp32.329.501.867,- dan Rp32.329.501.867,- tidak ada mutasi tambah pada asset Gedung dan bangunan pada periode Triwulan III tahun ini, disebabkan adanya pemblokiran anggaran belanja modal akibat dampak efisiensi anggaran pada tahun ini.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	32.329.501.867
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian pembangunan Langsung (pagar semi permanen)	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi perubahan (kekurangan volume)	-
Saldo per 31 Desember 2025	32.329.501.867
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-9.041.002.946
Nilai Buku per 31 Desember 2025	23.288.498.921

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.554.698.928,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung pada akhir periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.554.698.928,- dan Rp3.554.698.928,-. Tidak ada penambahan nilai Jalan, Irigasi, Jembatan dan jaringan sampai dengan Semester II tahun ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran belanja modal akibat dari dampak efesiensi anggaran tahun ini.

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.554.698.928
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset	-
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	3.554.698.928
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.703.564.334,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.851.134.594

*Aset Tetap Lainnya
Rp107.366.000,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut

Lampung periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp107.366.000 dan Rp107.366.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	107.366.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 September 2025	107.366.000
-	0
Nilai Buku per 30 September 2025	107.366.000

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak Terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode 31 Desember 2025 ini.

*Akumulasi Penyusutan
set Tetap
(Rp76.452.530.208,-)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp76.452.530.208,-) dan (Rp73.288.501.169,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	64.160.214.185	64.336.145.057	-175.930.872
2	Gedung dan Bangunan	9.041.002.946	9.041.002.946	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.703.564.334	1.703.564.334	0
4	Aset tetap yang tidak digunakan	1.855.609.275	0	1.855.609.275
Akumulasi Penyusutan		76.760.390.740	75.080.712.337	1.679.678.403

Aset Tak Berwujud
Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp2.239.978.729,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung pada periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.239.978.729,- dan Rp3.577.563.729,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung telah mengajukan Penetapan Status Aset ke Unit Eselon I sebagai syarat usulan penghapusan aset yang dihentikan dari penggunaannya. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.577.563.729
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.337.585.000
Saldo per 31 Desember 2025	2.239.978.729
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.855.609.275)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	384.369.454

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.855.609.275,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp1.855.609.275,- dan Rp2.962.265.981,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	2.239.978.729	1.855.609.275	384.369.454
Jumlah	2.239.978.729	1.855.609.275	384.369.454

Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa Nihil.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp152.532.910,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp152.532.910,- dan Rp233.814.569,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam

waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada pihak ketiga	152.532.910	Belanja barang yang masih harus di bayar berupa tagihan listrik dan telepon bulan Desember 2025
Jumlah	152.532.910	

*Pendapatan Diterima di Muka
Rp 0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp152.532.910,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp204.092.910,- dan Rp233.814.569,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang kepada Pihak Ketiga	152.532.910	233.814.569
Jumlah	152.532.910	233.814.569

Ekuitas

Rp41.671.051.591,-

C.26 Ekuitas

Ekuitas akhir satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung pada periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.671.051.591,- dan Rp46.174.926.474,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp868.273.761,-

Jumlah Pendapatan PNB Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp868.273.761,- dan Rp1.258.218.534,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pend Penj Hasil Peternakan & Budidaya	683.738.350	956.068.600	-28,48
Pend Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	0	45.400.934	-100,00
Pend Pengg Sarana & Prasarana Tusi	121.990.411	76.100.000	60,30
Pend Pengujian, Sertifikasi & Standarisasi	62.545.000	180.649.000	-65,38
Jumlah	868.273.761	1.258.218.534	(30,99)

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya merupakan Pendapan-LO yang diperoleh dari produksi benih dan hasil budidaya. Adapun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapan-LO yang diperoleh dari sewa asrama/guest house. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa kegiatan di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Kenaikan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak disebabkan adanya kenaikan pada pendapatan penjualan peikanan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana Tusi , kenaikan jumlah dalam pendapatan pengujian, sertifikasi serta adanya pendapatan dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Rp12.857.059.06

0,-

Jumlah Beban Pegawai Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung untuk periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.857.059.060,- dan Rp12.856.850.444,- . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 September 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.081.094.540	4.221.463.400	(3,33)
Pengembalian beban Pembulatan Gaji PNS	-337	-90	274,44
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.571	53.600	
Beban Tunjangan Suami/Isteri PNS	337.573.140	355.153.510	(4,95)
Beban Tunjangan Anak PNS	96.575.506	100.382.242	(3,79)
Beban Tunjangan Struktural PNS	35.910.000	55.090.000	(34,82)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	81.905.000	269.080.000	(69,56)
Beban Tunjangan PPh PNS	39.554.044	50.212.266	(21,23)
Beban Tunjangan Beras PNS	213.566.580	224.936.520	(5,05)
Beban Tunjangan Uang Makan PNS	555.370.000	569.123.000	(2,42)
Beban Gaji pokok PPPK	548.562.700	400.126.600	37,10
Beban Pembulatan Gaji PPPK	8.549	6.869	24,46
Beban Tunjangan Suami/Isteri PPPK	33.348.060	13.302.480	150,69
Beban Tunjangan Anak PPPK	7.149.042	3.429.360	108,47
Beban Gaji tunjangan Fungsional PPPK	15.350.000	12.760.000	20,30
Beban uang makan PPPK	126.499.000	70.316.000	79,90
Beban Tunjangan beras PPPK	31.937.220	17.815.320	79,27
Beban Uang Lembur	36.091.000	47.121.000	(23,41)
Beban Tunjangan Umum PNS	42.760.000	50.165.000	(14,76)
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	5.847.739.646	5.875.903.497	(0,48)
Pengembalian beban tunjangan fungsional pegawai	0	0	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) PPPK	726.013.799	520.409.870	39,51
Pengembalian beban tunjangan fungsional pegawai	0		#DIV/0!
Jumlah	12.857.059.060	12.856.850.444	0,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada akhir periode per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.403.911.300,- dan Rp4.118.995.517,-

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.851.291.661	2.621.306.962	#REF!
Beban Persediaan Bahan Baku	358.684.752	1.244.255.015	#REF!
Beban Persediaan Lainnya	193.934.887	253.433.540	#REF!
Jumlah Beban Persediaan	2.403.911.300	4.118.995.517	-41,64

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.890.379.393,- dan Rp6.442.943.945,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	826.005.250	1.890.525.335	(7,5)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	116.040.000	85.680.000	1,35
Pengembalian beban keperluan perkantoran		-2.366.000	
Beban Bahan	400.740.563	1.021.370.910	(2,8)
Beban Honor Output Kegiatan	14.470.000	740.885.000	(41,51)
Beban Langganan Listrik	1.858.018.458	2.092.545.231	(9,03)
Beban Langganan Telepon	41.946.770	45.268.234	(7,53)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	242.862.100		
Beban langganan daya dan jasa lainnya	29.172.782	23.439.974	2,15
Beban Jasa Lainnya	1.361.123.470	305.146.561	(85,17)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	57.317.000	(88,11)
Pengembalian Beban Penambah Daya tahan tubuh		-28.955.000	(100)
Beban Pengiriman Surat Dinas pos	-	796.700	(100)
Beban Sewa	-	158.690.000	(100)
Beban Jasa Profesi	-	52.600.000	(100)
Beban Jasa Lainnya		305.146.561	(100)
Jumlah	4.890.379.393	6.442.943.945	7.35

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp925.162.813,- dan Rp2.338.982.582,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.890.000	887.711.004	-81,31
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	759.272.813	810.111.578	-6,28
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	9.690.000	#DIV/0!
Beban pemeliharaan jalan dan jembatan	0	631.470.000	
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00
Beban persediaan suku cadang			
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	925.162.813	2.338.982.582	-60,45

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp389.915.327,- dan Rp1.526.892.421,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian beban perjalanan dinas TA 2025 dan TA 2024 :

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	309.912.215	1.474.722.421	-78,99
Pengembalian beban perjalanan dinas biasa	-754.000	-1.780.000	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000	11.850.000	-94,94
Pengembalian beban perjalanan dinas dalam kota		-400.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	42.500.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	80.157.112	0	#DIV/0!
Jumlah	389.915.327	1.526.892.421	-74,46

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Satker BBPBL Lampung pada akhir periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.163.327.881,- dan Rp8.665.100.798,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.219.492.900	2.560.343.668	0,00
Beban Persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	184.815.000		
Beban persediaan aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	0	0	
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	7.759.019.981	6.104.757.130	0,00
Jumlah	9.163.327.881	8.665.100.798	5,75

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat beban social pada Satker BBPBL Lampung.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk akhir periode per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.380.776.645,- dan Rp4.018.297.842,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.978.118.044	2.559.989.610	#REF!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.205.472.504	1.207.698.668	#REF!
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	50.376.125	60.934.188	#REF!
Beban Penyusutan Irigasi	39.468.568	39.468.569	#REF!
Beban Penyusutan jaringan	48.234.815	48.234.815	#REF!
Beban Penyusutan Aset Tetap Yg tidak digunakan dalam pemerintahan	59.106.589	101.971.992	0,00
Jumlah Penyusutan	3.380.776.645	4.018.297.842	-15,87

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk akhir periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan piutang PNB	0	0	#DIV/0!
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp 0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 32.142.903.706,-)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian kegiatan non operasional Per 30 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	49.920.000	25.103.000	98,86
Beban pelepasan aset non lancar	6.276.987.300	5.670.528.699	10,69
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	7.551.425.182	8.273.982.944	-8,73
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	325.002.930	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Surplus/defisit dari kegiatan lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	
Surplus defisit pelepasan dari kegiatan non opera	7.226.422.252	2.628.557.245	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	999.354.952	2.628.557.245	-61,98

Pos Luar Biasa
Rp0,-

D.13. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Ekuitas Awal

Rp46.174.926.474,-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.174.926.474,- dan Rp49.405.625.350,-.

Defisit LO Rp.(,-)

Rp(32.142.208.003)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp32.142.208.003,-) dan (Rp36.081.287.770,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
-	-
Jumlah	-

Koreksi atas
reklasifikasi Rp0,-

E.3.2.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi pada akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- dan untuk akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp0,-.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp43.733.983)

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode per 31 Desember 2025 dan akhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.733.983,- dan Rp765.38.798,-.

Koreksi tersebut berasal dari selisih nilai yang awalnya beban asset dikeluarkan yang habis pakai lalu dikoreksi dan dikeluarkan ke transaksi keluar lainnya

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Beban pelepasan asset lainnya	43.733.983
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp(0)

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
-	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.682.067.103,- dan Rp32.085.203.096,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	28.601.619.346
Diterima Dari Entitas Lain	-919.552.243
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Jumlah	27.682.067.103

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode per 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(919.552.243,-) sedangkan DKEL sebesar Rp28.601.619.346,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA- BUN.

Tidak terdapat Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0-, dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

E.7 Ekuitas akhir

Nilai Ekuitas pada periode akhir Semester II per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.671.051.591,- dan Rp46.174.926.474,-

E.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala BBPBL Lampung dengan Nomor: B.4/BBPBL/KP.440/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Mulyanto, S.T,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan	: Sunaryat, SP.
Program nasional, produksi, dan teknis lainnya	
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan	: Frederik Prabowo, S.St.Pi
Dukungan Manajemen	
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Eko Priyanto, SP. MM.
Bendahara Pengeluaran	: Yohana Florensia Corne

- Satuan Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 nomor: SP DIPA-032.04.2.427706/2024 tanggal 02 Desember 2024. Selama periode per 31 Desember 2025 telah terjadi revisi POK dan DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
- Revisi I yaitu pada tanggal 23 Februari 2025 yaitu revisi POK dengan nilai pagu yang masih sama dengan pagu anggaran awal ;
- Revisi II (kedua) yaitu tanggal 27 Maret 2025 yaitu revisi POK dengan anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya ;
- Revisi DIPA ke III (ketiga) yaitu revisi kanwil tanggal 23 April 2025 dengan anggaran yang masih sama dengan anggaran revisi sebelumnya.

- Revisi ke IV yaitu revisi kanwil tanggal 15 Juli 2025 dengan anggaran yang masih sama dengan anggaran revisi sebelumnya.
- Revisi ke V yaitu tanggal 07 Oktober 2025 dengan anggaran yang masih sama dengan anggaran revisi sebelumnya.
- Revisi ke VI yaitu revisi Kanwil tanggal 19 November 2025 dengan pagu anggaran yang mengalami perubahan menjadi Rp29.933.025.000,- dengan rincian :
 - 1. Anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp28.956.566.000,-
 - 2. Anggaran PNP/PNBP sebesar Rp 976.459.000,-
- Revisi ke VII yaitu tanggal 19 Desember 2025 dengan pagu anggaran yang masih sama dengan revisi sebelumnya.
- Revisi ke VIII yaitu tanggal 14 Januari 2026 yaitu revisi Kanwil Anggaran berkaitan dengan Pagu Minus belanja Pegawai namun dengan anggaran yang masih sama dengan sebelumnya.

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2025

- Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Kementerian / Lembaga
- Realisasi anggaran satker BBPBL Lampung senilai Rp28.601.619.346,- atau 95,55 % dari pagu revisi anggaran (revisi ke-7) senilai Rp29.933.025.000,00 (pagu yang diblokir senilai Rp9.054.230.000,00) terdiri dari:
 1. Realisasi dari belanja Rupiah Murni (RM) senilai Rp28.564.340.346 atau (98,65%) dari pagu senilai Rp28.956.565.000,-;
 2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp37.079.000,- atau (3,80%) dari pagu senilai Rp976,459,000,00.

Sampai dengan Semester II tahun 2025, tidak ada realisasi belanja Modal karena anggaran belanja modal di blokir efek efesiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Lingkup Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung TA 2025 senilai Rp10.227.005.648,- atau 90,85% dari target Rp11.256.984.000,-

Tabel 1. Realisasi Anggaran Prioritas Nasional TA 2025

Prioritas Nasional	No	Program Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri	1	Pengembangan Hilirisasi industri berbasis SDA Unggulan , Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi inovasi serta berorientasi ekspor	125.765.000	125.717.038	99,96
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2	Swasembada Pangan	11.131.219.000	10.101.288.610	90,75
Total			11.256.984.000	10.227.005.648	90,85%

- Terdapat asset Barang Milik Negara yang dilelang dan masuk ke dalam pendapatan penjualan peralatan dan mesin senilai Rp49.920.000,- yaitu berupa penjualan 1 unit mesin pembuat pellet, satu unit stationery generating set, 1 unit speed boat , 1 unit centrifuge (alat laboratorium umum) dan satu unit Pressure Sterilize dengan nomor risalah lelang nomor 63/05.02/2025.01 tanggal 19 Februari 2025.
- Terdapat perbedaan antara pendapatan LO (Laporan operasional) dengan pendapatan di LRA (Laporan Realisasi Anggaran) senilai Rp51.278.482,- perbedaan tersebut berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp1.358.482,- , dan penjualan peralatan dan mesin senilai Rp.49.920.000,-
- Terdapat utang kepada Pihak ketiga senilai Rp152.532.910,- yaitu berupa belanja barang yang masih harus dibayar berupa belanja langganan daya dan jasa berupa tagihan listrik dan telepon masing-masing sebesar RpRp149.435.736,- dan Rp3.097.174,-

